

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Hutan berfungsi penting bagi kehidupan dunia, sehingga harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia. Hutan juga memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat hutan tersebut bisa diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumber daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan (Zain, 1998:2).

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan membagi hutan berdasarkan statusnya menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Pasal 1 menjelaskan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah¹. Dari pembagian hutan tersebut terdapat beberapa opsi pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community based forest*

¹ Menurut Santosa dalam bukunya yang berjudul "Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah" (2005:157), disebutkan bahwa Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola tanah dan mengambil manfaat dari tanah tersebut. Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 16, Hak-hak atas tanah yaitu Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.

management)² dalam hutan skala kecil yang dapat dilakukan (Diana & Sukmareni, 2015:13-14).

Soeprapto (2010:1) menyebutkan, awalnya sasaran pengembangan hutan rakyat adalah pada lahan-lahan kritis yang berjurang, dekat mata air, lahan terlantar dan tidak lagi dipergunakan untuk budidaya tanaman semusim. Salah satu dari tujuan dari pengembangan hutan rakyat adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan kritis dan memperbaiki tata air dan lingkungan. Berhubungan dengan lahan kritis tersebut, lahan jenis ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produksi pertanian, karena keadaan tanah jenis ini bukan bentuk akhir dari tanah yang tidak bisa diolah kembali. Menurut Zain (1998:38) lahan kritis atau tanah kritis jika ditinjau dari definisinya yaitu :

1. Lahan yang tidak mampu secara efektif sebagai unsur produksi pertanian, sebagai media pengatur tata air, maupun sebagai pelindung alam lingkungan.
2. Lahan yang tidak sesuai antara kemampuan tanah dan penggunaannya, akibat kerusakan secara fisik, kimia dan biologis sehingga membahayakan fungsi hidrologis, sosial-ekonomi, produksi pertanian ataupun bagi permukiman. Hal ini dapat menimbulkan erosi dan longsor di daerah hulu serta terjadi sedimentasi dan banjir di daerah hilir.

²Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat atau *Community Based Forest Management* adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif. (Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS). Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada). Lihat dalam http://www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf (Diakses pada 16 Januari 2018)

Kekritisian suatu lahan menurut Sunartomo (2011:17) adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya baik sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan yang tergolong kritis tersebut dapat berupa:

1. Tanah gundul yang tidak bervegetasi sama sekali;
2. Ladang alang-alang atau tanah yang ditumbuhi semak belukar yang tidak produktif;
3. Areal berbatu-batu, berjurang atau berparit sebagai akibat erosi tanah;
4. Tanah yang kedalaman solumnya³ sudah tipis sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik;
5. Tanah yang tingkat erosinya melebihi erosi yang diijinkan

Provinsi Sumatera Barat mempunyai topografi wilayah yang cukup beragam, mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi pada jajaran pegunungan Bukit Barisan yang membentang di wilayahnya. Dengan tipikal wilayah seperti itu, tidak dapat dipungkiri bahwa di daerah Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai sebaran lahan-lahan kritis yang cukup luas di beberapa wilayah kota dan kabupatennya. Salah satu wilayah kabupaten yang mempunyai lahan kritis terluas di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota. Luas lahan kritis di wilayah tersebut pada tahun 2013 yaitu sekitar 137.167,00 Ha. Luas wilayah lahan kritis di kabupaten ini dari tahun ke tahun terlihat adanya

³ Rajamuddin (2019:47) menyebutkan *Solum* adalah bagian dari profil tanah dengan jeluk tertentu yang berkembang akibat proses pembentukan tanah yang dapat meliputi horizon A dan horizon B. Horizon A merupakan horizon mineral di permukaan tanah dan horizon B adalah horizon yang terbentuk di bawah horizon A.

pengurangan. Hal itu dapat dilihat dari data luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Perbandingan Luas Lahan Kritis Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2013 dengan Tahun 2014

No.	Kabupaten / Kota	Luas Lahan Kritis (ha)	
		Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Kab.Kep. Mentawai	-	125.408,67
2.	Kab. Pesisir Selatan	8.740,66	318.057,00
3.	Kab. Solok	37.838,47	-
4.	Kab. Sijunjung	75.517,92	73.925,00
5.	Kab. Tanah Datar	33.253,46	-
6.	Kab. Padang Pariaman	2.517,32	8.637,20
7.	Kab. Agam	3.717,35	29.600,00
8.	Kab. Lima Puluh Kota	137.167,00	130.690,10
9.	Kab. Pasaman	69.718,12	154.512,21
10.	Kab. Solok Selatan	13.789,85	-
11.	Kab. Dharmasraya	5.482,95	540.875,08
12.	Kab. Pasaman Barat	16.457,92	3.790,46
13.	Kota Padang	766,16	6.670,40
14.	Kota Solok	2.369,63	171,00
15.	Kota Sawahlunto	23.706,40	2.932,65
16.	Kota Padang Panjang	359,41	-
17.	Kota Bukittinggi	104,19	-
18.	Kota Payakumbuh	1.448,00	2.140,51
19.	Kota Pariaman	-	11.743,55

Sumber: Buku Data SLDH Provinsi Sumatera Barat tahun 2014

Berdasarkan data diatas terlihat pengurangan luas lahan kritis di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2013 ke tahun 2014 yakni seluas 6.476.90 Ha. Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya berbagai pihak dalam melakukan usaha rehabilitasi hutan dan lahan-lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh berbagai pihak dan *stakeholder* tidak terkecuali dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat yang telah memulai upaya tersebut pada tahun 2010. Jika dilihat dari tingkat ketercapaian selama lima tahun, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas ± 79.821 Ha atau 21,4% dari luas lahan kritis di wilayah Sumatera Barat. Luas lahan kritis dari tahun 2010 hingga tahun 2015 berturut-turut adalah 372.386 Ha, 361.336 Ha, 313.822 Ha, 302.181 Ha dan 292.565 Ha. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa luas lahan kritis di Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari kondisi awal di tahun 2010 seluas 372.386 Ha, dan kini luas lahan kritis tersebut turun menjadi 292.565 Ha.⁴

Salah satu faktor penunjang dalam penurunan luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat itu adalah dengan adanya pengelolaan hutan dan lahan melalui reboisasi dan konversi lahan kritis menjadi lahan produktif. Upaya pengelolaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh peran aktif dari *stakeholder* terkait saja namun juga dari masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hutan dan lahan-lahan kritis di Propinsi Sumatera Barat.

Upaya pengelolaan hutan dan konversi lahan kritis menjadi lahan produktif di wilayah Sumatera Barat juga terlihat pada masyarakat etnis Minangkabau di *Nagari* VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Masyarakat disana, khususnya petani mengenal lahan kritis tersebut dengan nama *Porak Liek*. Lahan yang berada di wilayah *Nagari* VII Koto Talago

⁴ dikutip dari <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/6696> diakses pada tanggal 31 Januari 2017 pukul 09.43 WIB

tersebut umumnya banyak berada di kawasan hutan dan perbukitan. Kepemilikan hutan dan lahan tersebut masih dalam tataran sistem tradisional budaya etnis Minangkabau yakni berbentuk sistem kepemilikan tanah ulayat⁵.

Sebagai bagian dari etnis Minangkabau, masyarakat *Nagari* VII Koto Talago sendiri juga membedakan jenis hutan ulayat di wilayah mereka tersebut dengan *hutan ulayat nagari* dan *hutan ulayat kaum*. Seperti yang dijelaskan oleh Navis (1984), Hutan ulayat *nagari* yaitu berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan *nagari* yang juga disebut sebagai hutan tinggi. Sedangkan untuk hutan ulayat kaum ialah tanah yang dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk dan disebut Hutan Rendah. Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, hak penguasaan tanah ulayat *nagari* berada pada *niniak mamak* dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat *nagari*, sedangkan pemerintahan *nagari* bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Sedangkan hak penguasaan ulayat kaum terdapat pada semua anggota kaum yang terdiri dari *jurai/paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh *mamak jurai/mamak* kepala waris.

Salah satu wilayah yang banyak terdapat *porak liek* (lahan kritis) yang termasuk ke dalam hutan ulayat *Nagari* VII Koto Talago berada di daerah *Jorong Sipingai*. Lahan yang terletak di perbukitan tersebut sebelumnya pernah direboisasi oleh masyarakat setempat dibeberapa titik dengan cara penanaman pohon pinus (*Pinus Mercusii Jungh*). Dari pohon tersebut masyarakat di *Nagari*

⁵ Ulayat berasal dari bahasa Arab *wilayah*. setiap *nagari* di Minangkabau mempunyai ulayat dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai (Navis, 1984).

VII Koto Talago memanfaatkan getah pohon yang dihasilkannya untuk menambah perkonomian para petani. Namun aktivitas penyadapan pohon pinus tersebut perlahan mulai kurang diminati oleh para petani *Nagari VII Koto Talago*. Hal ini disebabkan karena area penanaman pohon pinus itu tidaklah luas dan keuntungan dari getah yang diperoleh dari hasil penyadapannya sangat sedikit dibandingkan dari usaha pengelolaannya. Akhirnya kegiatan itu mulai ditinggalkan oleh masyarakat dan hutan ulayat yang telah ditanami pohon pinus dibiarkan begitu saja sampai pada akhirnya mulai ditumbuhi tanaman alang-alang dan semak belukar.

Sebenarnya tujuan awal dari kegiatan reboisasi lahan dengan penanaman pinus yang dilakukan petani dalam kawasan ulayat *Nagari VII Koto Talago* adalah untuk memberdayakan hutan *nagari* dan mengurangi luas lahan kritis yang ada disamping menambah perekonomian petani di *Nagari VII Koto Talago*. Karena perbandingan usaha reboisasi dengan hasil yang diperoleh tidak begitu membantu perubahan ekonomi petani maka kegiatan ini tidak terlihat lagi keberlanjutannya. Sehingga perlahan, banyak hutan *ulayat nagari* di wilayah VII Koto Talago berubah menjadi lahan kritis atau yang disebut oleh masyarakat di *Nagari VII Koto Talago* dengan istilah *porak liek*.

Kegiatan pengolahan lahan kritis atau *porak liek* oleh petani di *Nagari VII Koto Talago* itu sebenarnya mulai gencar dilakukan sejak pada tahun 1996. Sebelum mengelola lahan tersebut, kegiatan petani-petani di *Nagari VII Koto Talago* banyak berfokus pada kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup dengan memanfaatkan hasil pertanian di lahan produktif yang ada saja seperti padi, sayur-

sayuran, kakao, jagung dan juga dari pengolahan tanaman ubi kayu⁶. Upaya pengelolaan *porak liek* di *Nagari VII Koto Talago*, baru giat muncul ketika ada beberapa orang individu dari elemen masyarakat *Nagari VII Koto Talago* yang secara swadaya melakukan upaya reboisasi dan pengelolaan *porak liek* milik ulayat kaumnya. Kegiatan itu pertama kali digagas oleh salah satu individu petani di *Nagari VII Koto Talago* yaitu Bapak Erwin (47) yang juga merupakan warga *Jorong Sipingai*.

Berangkat dari pengalamannya ketika masih bekerja di PTPN V Ujung Batu, Propinsi Riau, Bapak Erwin mengelola lahan yang di dominasi tanaman alang-alang dan semak belukar di tanah ulayat kaumnya. Lahan tersebut diolah melalui proses yang cukup panjang dan kemudian ditanami dengan tanaman tua seperti pohon karet dan kakao. Upaya ini dilakukan oleh Bapak Erwin awalnya dipicu karena keperihatinan beliau dengan keadaan hutan dan lahan di *Nagari VII Koto Talago* yang mudah dan sering terbakar ketika musim kemarau.

Usaha Bapak Erwin dalam mengelola lahan-lahan tersebut tidak dilakukannya sendiri, namun turut serta mengajak beberapa individu masyarakat dengan cara membentuk kelompok tani. Kelompok tani awal yang dibentuknya diberi nama Kelompok Tani Johor Baru. Bapak Erwin bersama kelompok tani tersebut telah berhasil mengubah *porak liek* menjadi area perladangan dan perkebunan sebanyak 350 Ha hingga tahun 2016 di *Jorong Sipingai*. Karena

⁶ Di *Nagari VII Koto Talago* tanaman ubi kayu diolah menjadi sanjai dan *rubik ganepo* (cemilan yang terbuat dari singkong). Daerah *Jorong Koto Kociak*, merupakan salah satu daerah yang memproduksi *rubik ganepo* terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu industri rumah tangga di Kenagarian VII Koto Talago adalah Gallery Rendang Kokoci. Hasil produksi dari Industri Rumah Tangga ini telah dipasarkan pada beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, Medan, Batam dan Aceh.

usaha kerasnya dalam pengelolaan lahan kritis tersebut, Bapak Erwin bahkan mendapatkan penghargaan Plakat Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia pada tahun 2016.

Awalnya usaha yang dilakukan Bapak Erwin dalam mengelola lahan tersebut banyak mendapat kritikan dan cemoohan dari masyarakat sekitar, karena mereka beranggapan bahwa *porak liek* yang berada di daerah perbukitan *Jorong Sipingai* itu merupakan lahan gersang, dan rasanya tidak akan mungkin dapat diolah lagi. Oleh karena sifat dan faktor dari lahan seperti itulah masyarakat di *Nagari VII Koto Talago* menyebutnya dengan istilah *porak liek*. Namun berkat kegigihan usaha dari kelompok tani yang dibentuk Bapak Erwin, *porak liek* dapat dikonversi menjadi ladang atau *porak* yang menghasilkan nilai ekonomi. Melihat keberhasilan dari upaya kelompok tani yang dibentuk Bapak Erwin dalam mengolah *porak liek*, akhirnya banyak dari masyarakat *Nagari VII Koto Talago*, khususnya yang berprofesi sebagai petani mengikuti langkah usaha yang telah dirintis Bapak Erwin dalam mengelola *porak liek* yang tersebar luas di perbukitan *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago*.

Pernyataan seperti yang dijabarkan diatas memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa lahan kritis atau dalam istilah masyarakat *Nagari VII Koto Talago* disebut dengan *porak liek*, apabila dijadikan untuk usaha pertanian seringkali sangat susah untuk diolah agar bisa ditanami tanaman, serta usaha-usaha reboisasi yang dilakukan hanya akan merugikan saja. Padahal lahan kritis sebenarnya bukanlah bentuk kondisi akhir dari keadaan suatu lahan. Tidak banyak masyarakat khususnya petani yang sadar bahwa usaha

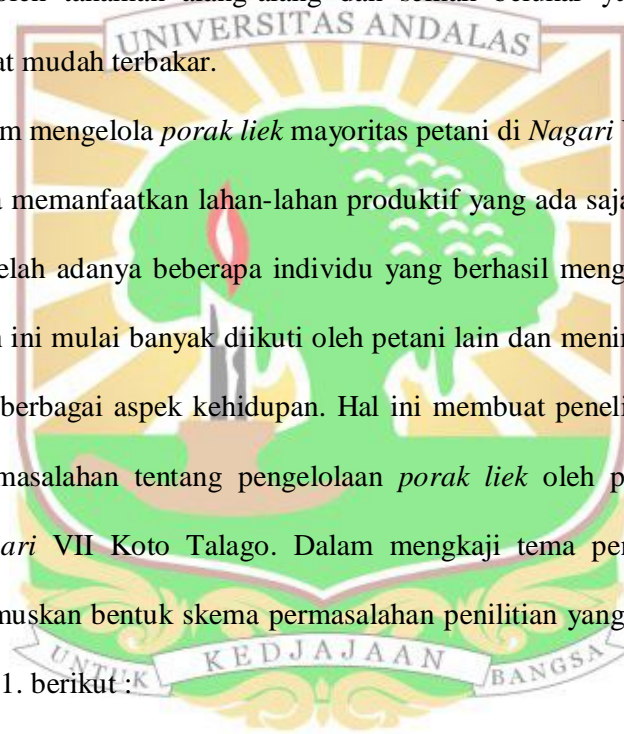
rehabilitasi lahan itu sangat penting dilakukan untuk mengkonversi lahan kritis. Namun, beberapa individu petani seperti di *Nagari VII Koto Talago* menyadari akan potensi sumber daya alam disekitarnya dan dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan menambah pendapatan perekonomiannya. Tentu dengan kondisi-kondisi yang memang harus membutuhkan upaya dan usaha dari manusia untuk merubah sumber daya alam tersebut agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya. Upaya tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan upaya rehabilitasi lahan. Upaya rehabilitasi tersebut juga membutuhkan proses-proses pengelolaan yang tepat terhadap lingkungan terkait pengolahan lahan kritis menjadi lahan yang bernilai ekonomis. Dengan memadukan pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dengan proses pengelolaan lahan kritis atau *porak liek* itulah yang akhirnya memperlihatkan suatu bentuk etnoekologi pada masyarakat petani di *Nagari VII Koto Talago* dalam mengelola lahan kritis di wilayahnya.

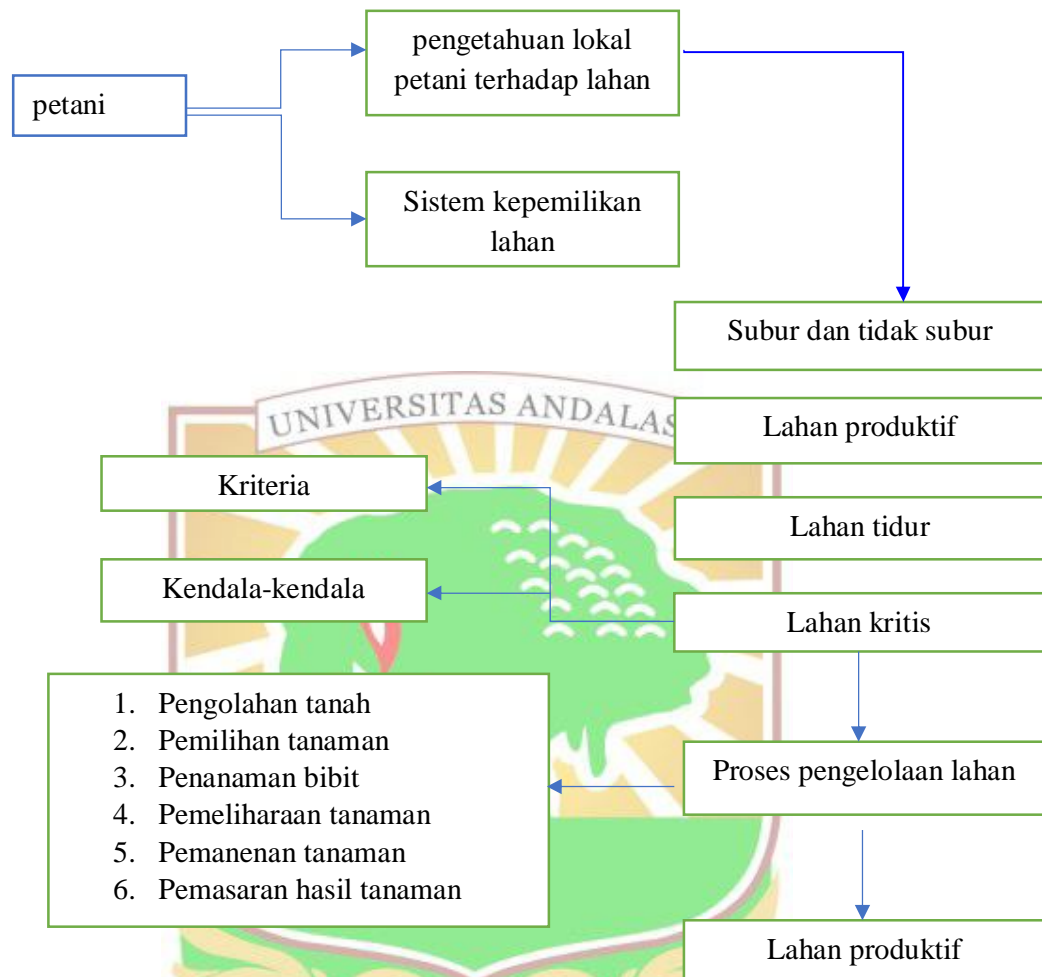
1.2 Perumusan Masalah

Manusia dan lingkungan merupakan unsur yang saling mempengaruhi di dalam ekosistem. Lingkungan merupakan faktor pendukung dalam kelangsungan hidup manusia, namun lingkungan tidaklah selalu dalam kondisi yang tetap. Lingkungan seringkali berubah dikarenakan perubahan dari unsur-unsurnya. Untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, individu manusia akan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Upaya penyesuaian inilah kemudian akan menghasilkan cara pengelolaan yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Berangkat dari hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti

tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana bentuk pengelolaan lahan kritis oleh petani di wilayahnya. Salah satu contoh bentuk implementasi pengelolaan lahan kritis oleh petani terlihat di *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota*. Kelompok petani di daerah tersebut berhasil mengelola lahan kritis yang disebutnya dengan *porak liek* seluas 350 Ha hingga tahun 2016. Lahan tersebut terdapat di wilayah yang banyak di dominasi oleh tanaman alang-alang dan semak belukar yang saat musim kemarau sangat mudah terbakar.

Sebelum mengelola *porak liek* mayoritas petani di *Nagari VII Koto Talago* tersebut hanya memanfaatkan lahan-lahan produktif yang ada saja untuk kegiatan pertanian. Setelah adanya beberapa individu yang berhasil mengolah *porak liek*, maka kegiatan ini mulai banyak diikuti oleh petani lain dan menimbulkan banyak dampak pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang pengelolaan *porak liek* oleh petani di *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago*. Dalam mengkaji tema penelitian tersebut peneliti merumuskan bentuk skema permasalahan penelitian yang diangkat dalam bentuk Bagan 1. berikut :



Bagan 1. Skema Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan skema permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengetahuan lokal masyarakat petani di *Nagari VII Koto Talago* terhadap kawasan lahan ?
2. Kendala apa yang dihadapi petani dalam mengelola *porak liek* di *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago* ?
3. Bagaimana proses dan bentuk pengelolaan *porak liek* yang dilakukan petani di *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan bentuk pengetahuan lokal petani *Nagari VII Koto Talago* terhadap kawasan lahan.
2. Untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi petani dalam pengelolaan *porak liek* di *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago*.
3. Untuk menganalisis bentuk dan proses pengelolaan *porak liek* yang dilakukan petani di *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan ilmu sosial, terutama dalam bidang antropologi ekologi dan bidang ilmu lainnya.
2. Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan yang serupa atau berkaitan dengan masyarakat petani dan lahan kritis. Selain itu hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan informasi dan pedoman bagi pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya masyarakat petani.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ilmu antropologi yang mengkaji tentang pengelolaan lahan cukup banyak yang dapat dijadikan bahan referensi. Beberapa diantaranya antara lain adalah: penelitian Amri Marzali (2010) dengan judul “*Strategi Petani Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan*”. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana strategi-strategi masyarakat Cikalong dalam mengelola lahan kering yang disebut lahan *pasir*. Strategi bertanam yang dilakukan petani di lahan *pasir* adalah menanam sebanyak mungkin jenis tanaman yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi sehari-hari dan juga kebutuhan akan uang kontan. Jadi lahan *pasir* merupakan satu usaha pertanian subsistensi sekaligus komersil. Jenis tanaman yang paling umum ditanam di lahan *pasir* adalah pisang dan karet, yaitu sekitar 63% unit *pasir* di daerah *sisi*⁷. Tanaman penting kedua yang setelah pisang dan karet yaitu sekitar 30% *pasir* adalah kopi, albasia, aren, petai, dan kelapa. Jenis tanaman lain yang punya potensi ekonomi tapi jarang dijumpai di lahan *pasir* antara lain adalah bambu, durian, dan cengkeh.

Nurdin (2011) juga melakukan penelitian dengan tema yang sama berjudul “*Penggunaan Lahan Kering di DAS Limboto, Provinsi Gorontalo untuk Pertanian Lanjutan*”. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa strategi utama yang digunakan masyarakat dalam penggunaan lahan kering di wilayah DAS Limboto, yaitu: *Pertama*, pengelolaan sistem budi daya dengan mengelompokkan tanaman

⁷ Sebutan daerah *sisi* dapat berarti secara geografis, tetapi juga dapat secara kultural. Secara geografis, daerah *sisi* berarti daerah pinggiran, jauh dari kota, dan dekat ke gunung. Sementara secara kultural, daerah *sisi* dipandang sebagai daerah terbelakang, agak kasar, dan kurang makmur (Marzali, 2003:45)

dalam suatu *landscape*⁸ mengikuti kebutuhan air yang sama, pola tanam yang tepat, pemberian mulsa dan bahan organik yang tersedia di lokasi untuk meningkatkan kesuburan tanah, pembuatan pemecah angin, dan penerapan sistem *agroforestry*⁹. Kedua, pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana produksi serta permodalan petani, pemberdayaan kelembagaan petani dan penyuluh, serta penerapan sistem agribisnis. Dan ketiga, kebijakan yang berpihak kepada pertanian di DAS Limboto, seperti pemberian subsidi kepada petani di daerah hulu untuk kegiatan konservasi lahan, pemberian subsidi pajak kepada petani di daerah hulu, penetapan perda pengelolaan lahan pertanian berbasis konservasi, dan pengelolaan lahan dengan sistem Hak Guna Usaha (HGU).

Penelitian lainnya oleh Sherman pada tahun 1978 yang berjudul “*Mitos Gurun Hijau: Ekologi dan Etnologi Penggarapan Padang Rumput oleh Masyarakat Batak*”. Dalam pengelolaan lahan, masyarakat mengolah lahan berpatok kepada pengklasifikasian musim yang mereka buat. Sebagian besar pekerjaan dimulai antara April dan permulaan Juli (sebagian besar lainnya dalam bulan Juni sesudah panen padi. Saat-saat yang dipilih tergantung dari pertimbangan-pertimbangan lokasi dan pemilihan waktu panen padi dan tanam-tanaman lainnya. Pekerjaan dijadwal dengan maksud menanam padi pada permulaan musim hujan berikutnya, yang terjadi antara bulan oktober dan Desember. Alang-alang sering dipotong dan dipakai untuk digantikan sebagai

⁸ *Landscape* atau Lanskap dalam Bahasa Indonesia, menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah menanam tanaman-tanaman dan lain-lain secara teratur dan tersusun.

⁹ Sistem *agroforestry* (wanatani) merupakan pengelolaan atau pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari dengan cara mengkombinasi kegiatan kehutanan dan pertanian (Muharam, 2011: 7)

pupuk hijau. Kalau tidak, lahannya akan dibakar atau didiamkan saja bila alang-alangnya cukup kering (Dove, 1987).

Menurut Soerjani dalam Dove (1987: 256), alang-alang telah digambarkan sebagai salah satu dari rumput liar yang terburuk dan daerah yang dikuasai rumput ini dianggap menjadi 'tanah kritis' secara pertanian tidak produktif, dan berada dalam keadaan degradasi/ menurun. Dalam penelitian Sativa (2016) tentang "Petani dan Alang-alang" yang berlokasi di Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok dijelaskan bahwa Dinas kehutanan bekerjasama dengan sebuah Lembaga yang bernama *Netherlands-based NGO (CO2 Operate B.V)* telah mengadakan penyadaran/penyuluhan kepada masyarakat (kelompok) untuk melaksanakan penanaman pohon bernilai ekonomis di lahan alang-alang. Kegiatan yang dilakukan melalui program ANR (*Assisted Natural Regeneration*) dengan mempercepat konversi lahan alang-alang. dari keseluruhan lahan yang dipenuhi alang-alang, terdapat 7,2 hektar lahan kritis yang telah direhabilitasi.

Dari beberapa penelitian yang dirangkum diatas dapat menjadi bahan tinjauan dan acuan bagi penelitian tentang petani dalam pengelolaan lahan kritis atau *porak liek* di Nagari VII Koto Talago. Namun terdapat perbedaan tersendiri dalam penelitian ini dengan beberapa bahan tinjauan pustaka di atas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Marzali (2010) tentang pengelolaan lahan pasir oleh masyarakat Cikalong belum dijelaskan secara rinci mengenai strategi masyarakat dalam mengelola lahan, namun hanya menjelaskan tentang jenis tanaman yang cocok dengan kondisi lahan. Pada penelitian tentang lahan kering di DAS Limboto yang dilaksanakan oleh Nurdin (2011) dan penelitian tentang

penggarapan padang rumput belum menjelaskan secara jelas tentang gambaran petani pengolah lahan. Perbedaan penelitian dengan literatur adalah peneliti akan melihat bagaimana pengetahuan lokal petani tentang kawasan lahan dan kendala-kendala yang dihadapi petani untuk mengetahui proses dan bentuk pengelolaan yang dilakukan petani dalam pengelolaan lahan kritis atau yang disebutnya dengan *porak liek*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sativa (2016) tentang “Petani dan Alang-alang di wilayah *Nagari* Paninggahan”, usaha pengolahan lahan yang dilakukan masyarakat petani didasarkan pada program pemerintah yaitu ANR (*Assisted Natural Regeneration*) yang dijalankan oleh suatu lembaga eksternal atau LSM dan strategi yang dilakukan petani diperoleh dari rasionalitas petani, sedangkan pada penelitian ini pada petani di *Nagari* VII Koto Talago, upaya pengolahan lahan kritis tidak dimulai dahulu berdasarkan pada program yang dibuat oleh pemerintah serta tidak ada Lembaga eksternal seperti LSM dan NGO yang masuk dan mensosialisasi program atau kegiatan pengolahan kritis kepada petani. Namun telah dimulai dahulu dari kesadaran masyarakat sendiri dan swadaya beberapa individu-individu warga masyarakat *Nagari* VII Koto Talago untuk mengolah lahan-lahan kritis yang cukup banyak di daerah mereka.

1.6 Kerangka Pemikiran

Parsudi Suparlan (2004:4) melihat kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia yang secara bersama dimiliki oleh para warga sebuah masyarakat. Dengan kata lain kebudayaan adalah sebuah pedoman menyeluruh bagi kehidupan sebuah masyarakat dan para warganya. Kebudayaan dilihat sebagai konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode yang diyakini

kebenarannya oleh warga masyarakat yang menjadi pemilikinya. Kebudayaan dengan demikian merupakan sistem-sistem acuan yang berada pada berbagai tingkat pengetahuan dan kesadaran, manusia menggunakan sistem acuan (konsep, teori, dan metode) ini untuk menghadapi lingkungannya. Dengan begitu tindakan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan berasal dari pengetahuan dan pengalamannya maupun interaksi dengan individu-individu di sekitarnya.

Dalam upaya pengelolaan lahan kritis menjadi lahan produktif terdapat hubungan interaksi antara petani dengan lingkungannya. Interaksi petani dengan lingkungannya ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menggunakan sumber daya alam. Dalam ilmu antropologi sub-disiplin ilmu antropologi yang fokus dalam membahas tentang hubungan manusia dan lingkungan tersebut adalah kajian antropologi ekologi.

Antropologi ekologi (*ecological anthropology*) merupakan spesialisasi di dalam antropologi yang menurut Julian Steward khusus mempelajari atau menjelaskan asal-usul, ciri-ciri dan pola-pola budaya tertentu yang tampak di berbagai daerah yang berlainan. Di dalam *The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology* dinyatakan bahwa “fokus antropologi adalah terhadap hubungan-hubungan yang kompleks antara manusia dengan lingkungannya (Febrianto, 2016:4).

Salah satu perspektif yang berada dalam lingkup kajian antropologi ekologi adalah **etnoekologi**. Etnoekologi dapat diartikan sebagai upaya manusia beradaptasi dengan lingkungannya, cara manusia menggunakan lingkungan dan

juga keselarasan hidup sosial dengan lingkungan alam manusia. Ahimsa-Putra (2007) mengemukakan tentang pengertian dari konsep etnoekologi adalah:

“Etnoekologi menelaah cara-cara masyarakat tradisional memakai ekologi dan hidup selaras dengan lingkungan alam dan sosialnya. Kehidupan masyarakat tradisional pada umumnya amat dekat dengan alam, dan manusia mengamati alam dengan baik, mengenal karakteristiknya sehingga mereka tahu bagaimana menanggapi”.

Dapat dikatakan bahwa apa yang disediakan oleh alam sejatinya dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kehidupannya, tanpa merusak dan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.

Pendekatan etnoekologi merupakan salah satu dari empat aliran yang dibangkitkan oleh teori ekologi budaya dari Julian Haynes Steward. Steward (dalam Poerwanto, 2006:68) menjelaskan bahwa ekologi budaya atau *cultural ecology* merupakan sebuah ilmu yang mengkaji mengenai bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan suatu lingkungan geografi tertentu. Salah satu kaidah dasar ekologi budaya ialah pembedaan antara lingkungan- sebagaimana- adanya dengan lingkungan efektif. Lingkungan efektif ialah lingkungan sebagaimana dikonseptualisasikan, dimanfaatkan dan dimodifikasi oleh manusia. Beberapa antropolog memandang cara suatu budaya memanfaatkan lingkungannya sebagai suatu fungsi dari cara budaya tersebut menyerap serta mengkonseptualisasikan lingkungan itu.

Tujuan dan metode dari pendekatan etnoekologi banyak berasal dari etnosains dimana penekanannya adalah pada sistem pengetahuan yang khas dari suatu masyarakat. Pengetahuan yang khas dari suatu masyarakat dapat dipahami melalui istilah lokal yang ada pada suatu masyarakat tersebut karena “lingkungan

budaya” dikodefikasi dalam bahasa. Melalui klasifikasi lokal yang dibuat oleh masyarakat dari suatu kebudayaan, peneliti dapat menemukan makna dari suatu kebudayaan sebab di dalam bahasa terkandung ide-ide masyarakat yang kita teliti melalui lingkungannya. Pandangan masyarakat mengenai lingkungannya menghasilkan perilaku fisik yang nyata, lewat mana individu secara langsung menciptakan perubahan dalam lingkungan fisik mereka, maka dari itu etnoekologi bertujuan untuk melukiskan perilaku budaya (*cultural behavior*) dengan memformulasikan “apa yang harus diketahui seseorang agar dapat memberikan tanggapan yang secara kultural tepat dalam suatu konteks sosio-ekologis” (Vayda dan Rappaport; Frak dalam Ahimsa-Putra 1994:7-8). Pola tindakan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pengaruh dari sistem ide dan pengetahuan yang dikatakan paradigma etnosains sebagai kebudayaan.

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk di dalamnya hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti tersalinasi¹⁰. (FAO dalam Arsyad, 1989). Dalam pengelolaannya, lahan dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non pertanian. Penggunaan

¹⁰ Berdasarkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R. No.18 tahun 2008 di jelaskan bahwa kegiatan reklamasi dan revegetasi bertujuan untuk memulihkan kondisi lahan sehingga mendekati kondisi awal penambangan. (Pongtulan. 2015). Sedangkan Salinitas menurut Departemen Pertanian adalah tingkat keracunan tanah yang disebabkan karena tingginya kadar garam terlarut dalam tanah yang dipengaruhi oleh pasang surut dan intrusi air laut. Jadi tersalinasi ada keadaan dimana lahan mengalami salinitas.

lahan pertanian dapat berupa sawah, tegalan, kebun dan ladang. Sedangkan penggunaan lahan non pertanian dapat berupa pemukiman atau perindustrian.

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahannya dan tanpa adanya pengelolaan tanaman yang kurang tepat akan menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan tersebut dalam memproduksi lahan pertanian dan mendorong timbulnya lahan kritis. Lahan kritis yang telah mengalami kerusakan baik fisis kimia maupun biologisnya yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, pemukiman dan kondisi sosial ekonomisnya¹¹.

Lahan kritis menurut Arsyad (1989) adalah kondisi lahan yang terjadi karena tidak sesuainya kemampuan lahan dengan penggunaan lahannya, sehingga mengakibatkan kerusakan lahan secara fisik, khemis, maupun biologis. Kondisi lahan kritis atau kering yang terdegradasi namun sesuai untuk budi daya pertanian, akan dapat menjadi produktif kembali bila dilakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan¹², sehingga dapat dimanfaatkan untuk memproduksi berbagai komoditas pertanian, baik komoditas perkebunan seperti sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, dan lada maupun untuk komoditas tanaman pangan.

Kriteria lahan kritis adalah lahan yang dipenuhi semak belukar, alang-alang dan hanya bisa dilakukan pertanian tanaman kering. Alang-alang adalah jenis

¹¹Lihat pada http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/...JUPRI/LAHAN.pdf (diakses pada 01 Mei 2017 pada 21.12 WIB)

¹² Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase, sedangkan rehabilitasi merupakan suatu usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya (Wahono, 2002:3). Rehabilitasi dan reklamasi lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

rumpun tahunan yang menyukai cahaya matahari, dengan bagian yang mudah terbakar di atas tanah dan akar rimpang (*rhizome*) yang menyebar luas di bawah permukaan tanah. Alang-alang dapat berkembang biak melalui biji dan akar rimpang, namun pertumbuhannya terhambat bila ternaungi. Seringkali terdapat anggapan bahwa padang alang-alang merupakan kondisi akhir, dari suatu proses yang searah (tidak dapat balik) dari penggundulan hutan atau penelantaran lahan pertanian, dan oleh sebab itu keberadaan padang alang-alang selalu bertambah luas (Friday. et al, 2000:17-19).

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi lahan kritis adalah konservasi dan rehabilitasi. Menurut Arsyad (1989:29), konservasi merupakan penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah.

Rehabilitasi diartikan sebagai suatu usaha pembenahan yang ditujukan kepada lahan yang telah rusak, agar dapat dipergunakan kembali. Salah satunya dengan melakukan reboisasi yang bertujuan untuk memperbaiki daya guna pemanfaatan sumber kekayaan tanah dan air. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/ MENHUT-II/2014, *Reboisasi* merupakan upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Kegiatan *reboisasi*, yang pengelolaannya yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari proses penanamannya hingga proses pemetikan hasil melibatkan masyarakat setempat. Dengan demikian, upaya rehabilitasi lahan yang dilakukan

oleh para petani di *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago* dimaksudkan untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan dan mengambil manfaat dalam bidang ekonomi terhadap lahan tersebut.

Petani di *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago* dalam upaya rehabilitasi lahan umumnya tidak melakukannya secara sendiri-sendiri namun bersama kelompok atau komunitasnya. Komunitas merupakan suatu kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, serta terikat oleh suatu rasa identitas komunitas (Koentjaraningrat, 2000:148). Kriteria yang utama bagi adanya suatu komunitas adalah terdapat hubungan sosial (*social relationship*) antara anggota suatu kelompok. Dapat dikatakan bahwa komunitas menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu dan faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya (Nasdian, 2007: 339). Dengan demikian, petani yang terdapat di *Nagari VII Koto Talago* umumnya akan mengolah lahan bersama anggota komunitasnya sehingga memungkinkan orang yang tidak mempunyai lahanpun bisa mendapatkan bagian dari kerja sama dalam pengelolaan lahan tersebut.

Berpedoman kepada **perspektif etnoekologi**, secara spesifik dengan menggunakan dasar pemikiran *cultural ecology* dari Julian Steward dapat dipahami bahwa pola hubungan manusia dengan lingkungan menciptakan pola hubungan yang khas / spesifik. Budaya yang spesifik ini akan menyesuaikan atau membentuk kondisi-kondisi lingkungan secara khas. Hal ini terwujud dalam

kelompok sosial yang berbeda. Oleh karena terdapat kekhasan karakteristik ekologi dari setiap kelompok sosial, maka kelompok sosial tersebut memiliki karakteristik *local ecology*.

Karakteristik struktural dan kultural serta karakteristik ekologi komunitas lokal (kelompok sosial) dalam konteks hubungan sebab-akibat menimbulkan beragam aktivitas yang diarahkan oleh struktur dan kultur komunitas dan dibatasi oleh lingkungan dan pola adaptasi ekologi komunitas tersebut. Aktivitas tersebut merupakan aktivitas bersama yang dibesarkan pada keinginan mencapai tujuan tertentu, dengan jalan mengubah sesuatu secara temporer atau tetap. Dengan demikian di setiap komunitas lokal (kelompok sosial) memiliki suatu karakteristik yang khas, yakni *collective action* (Nasdian, 2007:341)

Petani dalam menginterpretasikan lingkungannya, sadar bahwa alam tidak selalu berada dalam kondisi yang tetap. Kondisi alam yang berubah itulah yang akhirnya membuat manusia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam menyiasati hal tersebut, pada prinsipnya petani memiliki strategi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan alam lingkungannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki strategi-strategi yang digunakannya untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Poerwadarminta (dalam Ahimsa-Putra, 1986: 65), strategi adalah cara atau langkah yang diambil oleh individu atau kelompok dalam mempertahankan keberadaannya di dalam masyarakat agar tujuan-tujuan hidupnya terpenuhi dengan baik.

Strategi itu sendiri tidak hanya memiliki fungsi sebagai sarana atau cara setiap orang agar bisa diterima dilingkungannya, tetapi strategi bisa diartikan sebagai pola yang dibentuk oleh berbagai usaha yang direncanakan manusia untuk dapat memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan dan memecahkan masalah yang langsung dihadapi (Ahimsa-Putra, 1986:15). Dalam penelitian ini strategi yang diartikan sebagai serangkaian cara atau langkah-langkah yang diambil oleh petani *Nagari VII Koto Talago* dalam mengelola lahan.

Strategi-strategi yang dilakukan petani dalam pengolahan lahan kritis tidak terlepas dari sistem pengetahuan petani mengenai kawasan lahan. Sistem pengetahuan ini berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi yang digunakan. Menurut Koentjaraningrat, et.al (2003:219) sistem pengetahuan merupakan semua hal yang diketahui oleh manusia dalam suatu kebudayaan mengenai lingkungan alam maupun sosialnya menurut asas-asas susunan yang tertentu. Pengetahuan juga merupakan suatu proses sosial karena pengetahuan lahir sebagai produk dari interaksi yang berkelanjutan serta dialog diantara aktor yang berbeda dan sumber daya yang berbeda pula (Ekawati, 2006 :207). Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman serta interaksi dengan orang-orang sekitar maupun melalui hubungan langsung dengan lingkungan itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut beberapa konsep tentang sistem pengetahuan khususnya tentang pengetahuan lokal petani di *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago* berkaitan dengan pengelolaan *porak liek* dijabarkan dalam penelitian ini.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago*, Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. *Nagari VII Koto Talago* terdiri dari tujuh *Jorong*, yaitu Koto Kociak, Padang Jopang, Sipingai, Padang Kandi, Ampang Godang, Tanjuang Jati dan Talago.

Dasar penetapan lokasi berdasarkan survey awal pada 26 Januari 2017, bahwasannya lahan kritis atau *porak liek* di *Nagari Talago* telah dikelola menjadi lahan produktif. Lahan tandus yang berisi alang-alang tersebut dikembangkan dengan tanaman karet sehingga bernilai ekonomi. Pengelolaan jenis lahan kritis ini telah berhasil menurunkan luas lahan kritis di Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat dengan bukti terdapatnya tokoh individu yang menerima piagam Kalpataru tingkat nasional yaitu Bapak Erwin seorang warga asli *Nagari VII Koto Talago* yang memprakarsai serta telah sangat banyak melakukan pengelolaan lahan kritis di wilayah *Nagari VII Koto Talago*. Selain itu di lokasi penelitian ini telah banyak juga kelompok tani yang berkembang dan memfokuskan program kelompok mereka dalam pengelolaan lahan-lahan kritis seperti Kelompok Tani Johor Baru dan Palo Lubuak.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha

menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014: 13)

Karakter khusus penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1993) berupaya mengungkap keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari secara komprehensif dan rinci. Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula. Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Penelitian mengenai bagaimana pengelolaan *porak liek* pada petani di *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago* ini menggunakan salah satu perspektif dalam *etnosains*, yaitu perspektif etnoekologi dengan pendekatan riset studi kasus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cresswell (2015: 135) Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

1.7.3 Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau

pewawancara mendalam (Afrizal, 2014:139). Pemilihan informan pada penelitian ini, dilakukan dengan metode *non-probability* karena tidak semua individu dapat dijadikan infoman. Metode ini dilakukan dalam dua bentuk yaitu *purposive* dan *snowball*.

Teknik *purposive* adalah metode pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh peneliti adalah peran dan pekerjaan, serta status sosial informan terkait dengan rumusan penelitian. Untuk teknik *snowball*, peneliti akan meminta rekomendasi dari informan pertama untuk menunjukkan beberapa informan yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian peneliti meminta rekomendasi lagi dari informan pertama. Teknik ini digunakan agar peneliti mendapatkan gambaran dalam pemilihan informan yang dianggap paling tepat dalam menentukan informan kunci sesuai dengan permasalahan penelitian.

Individu yang dijadikan informan pertama dalam pemilihan informan melalui teknik *snowball* adalah *wali nagari* dan beberapa staffnya. Alasan memilih informan tersebut karena dianggap banyak mengetahui tentang seluk beluk penduduk dan wilayahnya. Selanjutnya sesuai dengan metode *snowball* berdasarkan rekomendasi dari *wali nagari*, peneliti diarahkan kepada ketua Gapoktan Gakosta yaitu Bapak Erwin (43) sebagai informan selanjutnya. Karena dianggap sebagai individu yang paham tentang pengelolaan *porak liek* di Nagari VII Koto Talago. Dari informan ini peneliti kembali meminta direkomendasikan untuk menemui beberapa informan selanjutnya yang masih berkaitan dengan tema

penelitian. Peneliti diarahkan kepada beberapa orang individu petani yang termasuk kedalam anggota kelompok tani yang ikut dalam pengelolaan lahan kritis atau *porak liek*. Setelah mendapatkan beberapa informan di lokasi penelitian, maka peneliti selanjutnya mengklasifikasikan informan-informan tersebut atas dua jenis yaitu informan kunci dan informan biasa.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah kalangan petani pengelola *porak like* di Jorong Sipingai, *Nagari VII Koto Talago*. Sedangkan informan biasa adalah perangkat *nagari* dan warga masyarakat tempat lokasi penelitian yang dianggap cocok untuk diwawancarai dan nantinya bisa menjadi bahan kelengkapan dari penelitian ini. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti mengambil informan sebanyak sembilan orang informan berdasarkan rekomendasi dari informan kunci serta aspek kecukupan data yang diperoleh dari informan-informan tersebut. Data Informan -informan tersebut antara lain:

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Keterangan
1.	Erwin	Laki-laki	52 Th	Petani/Ketua Gapoktan Gakosta	Informan Kunci
2.	Yon Hendri	Laki-laki	50 Th	Wali <i>Nagari VII Koto Talago</i>	Informan Kunci
3.	Betro Yudisman	Laki-laki	52 Th	Wali <i>Jorong Sipingai</i>	Informan biasa
4.	Mansurianis	Perempuan	58 Th	Petani/Sekretaris Poktan Palo Lubuak	Informan kunci
5.	Efianto Dt Tumbi	Laki-laki	63 Th	Sekretaris LPM	Informan biasa
6.	Daharnis Dt. Mongguang	Laki-laki	65 Th	Petani	Informan kunci
7.	Sani	Perempuan	35 Th	Petani	Informan kunci
8.	Warni	Perempuan	32 Th	Petani	Informan kunci
9.	Heri Nizwar.ZA	Laki-laki	50 Th	Staff kantor Wali <i>Nagari</i>	Informan biasa

Berdasarkan Tabel 2 di atas, terlihat jelas informan yang dipilih mewakili kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui awal mula pengolahan lahan kritis maka peneliti menetapkan kriteria informan kunci yaitu orang yang terlibat langsung dalam pengolahan lahan kritis yang mana ditunjukkan oleh informan nomor 1 yaitu Bapak Erwin (52) dan nomor 2 yaitu Bapak Yon Hendri (50). Peneliti juga menetapkan kriteria informan biasa yaitu individu yang merupakan masyarakat pribumi *Nagari* VII Koto Talago yang sedikit mengetahui tentang permasalahan tema penelitian dan dapat membantu peneliti dalam mencari data yang ingin ditemukan.

Peneliti juga menetapkan informan kunci yaitu ketua Kelompok Tani Johor Baru dan Kelompok Tani Palo Lubuak. Kedua kelompok tani ini merupakan kelompok tani yang ikut terlibat langsung dalam pengolahan *porak liek*. Pada Tabel 2, ketua kelompok tani ditunjukkan oleh informan nomor 1 dan sekretaris kelompok tani Palo Lubuak ditunjukkan oleh informan nomor 2.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Penggunaan Data Sekunder dan Studi Kepustakaan

Penggunaan data sekunder dan studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendukung data-data yang telah didapatkan oleh peneliti, yang sesuai dan relevan dengan penelitian. Adapun data yang akan diambil adalah data sekunder dari *nagari*, kecamatan, kabupaten, data kependudukan, dan data dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang masih terkait dan relevan

dengan objek penelitian termasuk buku-buku, keterangan penelitian, artikel-artikel di majalah, koran-koran, internet dan jurnal-jurnal ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

2. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan menurut Angrosino (dalam Creswell, 2015:231) berarti memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indra peneliti, seringkali dengan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi terbatas, dan tidak terlibat aktif dalam aktifitas sosial informan penelitian. Observasi yang dilakukan adalah mengamati dan memahami gambaran *porak liek* atau lahan kritis maupun teknologi yang digunakan petani dalam pengelolaannya. Penelitian ini akan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, buku catatan lapangan, *tape recorder* dan kamera yang digunakan untuk mendokumentasikan seluruh peristiwa ketika penelitian. Pengamatan yang peneliti lakukan dimaksudkan agar pemahaman mengenai pengelolaan lahan kritis bisa lebih mendalam, karenanya observasi juga digunakan untuk menemukan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara selanjutnya.

3. Wawancara Bebas dan Mendalam

Bentuk wawancara dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terhadap informan dimana seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang dibuat sebelum melakukan wawancara,

melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya (Afrizal, 2014: 20). Dalam wawancara biasanya peneliti menggunakan pedoman wawancara yang biasanya pertanyaannya tidak terperinci, kegunaan dari pedoman wawancara adalah agar pertanyaan yang akan diajukan tidak mengambang. Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam nantinya diharapkan akan mendapatkan informasi dan keterangan tentang gambaran kehidupan petani di lokasi penelitian serta cara-cara yang digunakan dalam mengatasi masalah, selanjutnya juga diharapkan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Wawancara dilakukan kepada delapan individu yang dipilih menjadi informan, untuk informan Bapak Wali *Nagari* wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juli 2017 di kantor Wali *Nagari*, wawancara dengan Bapak Erwin dilakukan pada tanggal 25 Juli 2017 di lahan, wawancara dengan Bapak Efianto Dt. Tumbi dilakukan pada tanggal 26 Juli 2017, wawancara dengan Ibu Warni dan Ibu Sani dilakukan pada tanggal 27 Juli 2017 di rumah informan, wawancara dengan Bapak Betro dilakukan di lahan dan wawancara dengan Ibu Mansurianis dilakukan di rumahnya pada tanggal 6 September 2017 dan kemudian wawancara dengan Bapak Daharnis Dt. Mongguang dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017.

Pelaksanaan wawancara mendalam dalam penelitian dilakukan secara terbuka dalam situasi non-formal, sehingga tercipta suasana spontan dan tidak terdapat jarak antara peneliti dan informan. Dengan wawancara mendalam, peneliti dapat mengetahui bentuk pengelolaan *porak like* yang dilakukan oleh petani. Sebelum dilaksanakan wawancara mendalam terhadap informan, terlebih dahulu disusun pedoman wawancara yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

1.7.5 Analisis Data

Bogdan dan Taylor (1993: 131-132) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang menuntut suatu usaha secara formal untuk mengidentifikasi tema-tema secara formal dan membentuk hipotesis (ide-ide) yang bisa diangkat dari data dan usaha untuk memperlihatkan adanya dukungan terhadap tema-tema dan hipotesa-hipotesa itu.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu, data teks seperti transkrip atau data gambar seperti foto) untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan (Creswell, 2015: 251). Data yang diperoleh dapat berupa catatan-catatan peneliti, dokumen pribadi maupun data sekunder. Data tersebut dikelompokkan menurut tema dan masalah penelitian kemudian dianalisis berdasarkan kerangka pemikiran penelitian dan disajikan menjadi hasil penelitian yang ilmiah.

Penganalisan data-data yang telah dikumpulkan, terutama data lapangan yang menunjukkan bentuk-bentuk pengelolaan *porak liek* pada petani di *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago*, dideskripsikan secara *holistic* (menyeluruh) yang selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa konsep-konsep dalam kajian etnoekologi. Dalam membangun analisis tersebut maka langkah-langkah analisis dalam data penelitian ini ditentukan dari beberapa langkah berikut:

- a) Mengumpulkan data-data serta mengidentifikasi bentuk-bentuk proses pengelolaan dan pengolahan *porak liek* yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok petani di *Jorong Sipingai Nagari VII Koto Talago*.
- b) Mengumpulkan data-data serta mengidentifikasi bentuk-bentuk pengetahuan masyarakat dan individu petani di *Nagari VII Koto Talago* tentang tanah dan lahan.
- c) Membangun analisis dari beberapa konsep dalam kajian antropologi ekologi terhadap pengelolaan *porak liek* pada petani di *Jorong Sipingai Nagari VII Koto Talago*.

Tahap berikutnya dari analisis data ini adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data. Untuk menjaga kesahihan data, selama dan sesudah penelitian dilakukan pengecekan ulang, seperti teknik *reinterview* pada setiap jawaban yang diberikan oleh informan. Analisis data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang dipercayai sebagai kekuatan untuk penulisan dalam pendekatan kualitatif.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Proses awal dilakukannya penelitian ini berlangsung sejak bulan Januari 2017. Tahap awal dimulai dari membuat rancangan rencana penelitian (proposal penelitian), observasi dan survei langsung ke lapangan. Setelah melalui proses bimbingan dalam merancang dan menyusun proposal yang pada awalnya berjudul “*Strategi Adaptasi Masyarakat Pertanian Lahan Kritis*”, seperti yang tertera pada surat keterangan penyusunan/penulisan skripsi peneliti, akhirnya diubah menjadi “*Strategi Petani dalam Pengelolaan Lahan Kritis*” dengan lokasi penelitian di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Proposal penelitian tersebut diajukan dan dipertahankan dalam sidang ujian proposal penelitian pada tanggal 24 Mei 2017 di ruang sidang jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Setelah dinyatakan lulus, proposal penelitian tersebut selanjutnya dijadikan pedoman bagi peneliti dalam penyusunan dan penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Tahapan berikutnya peneliti mulai menyelesaikan dan menyiapkan segala urusan yang berhubungan dengan dokumen administrasi penelitian. Pada tanggal 20 Juli 2017 peneliti mulai melakukan proses penelitian lapangan di lokasi penelitian yang sudah ditentukan, lengkap dengan dokumen dan instrumen penelitian. Penelitian dilokasi dilakukan secara intensif dengan melakukan pengamatan terlibat langsung dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan. Hal tersebut digunakan peneliti untuk mendapatkan data dan fakta yang

diperlukan terkait dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Peneliti berada di lapangan untuk melakukan penelitian memakan waktu lebih dari 3 bulan, melebihi waktu sebulan dari perencanaan waktu penelitian di lapangan. Selama periode itu peneliti di lapangan banyak melakukan kegiatan penelitian seperti mengamati langsung perilaku petani.

Peneliti di lapangan juga mendapatkan beberapa data sekunder dari *wali nagari* VII Koto Talago beserta staf dan juga mendapatkan informasi tentang informan yang cocok untuk penelitian awalnya peneliti melakukan pengamatan terhadap kelompok tani Johor Baru, yang merupakan kelompok tani yang pertama kali merintis mengelola lahan kritis di kawasan perbukitan *Jorong* Sipingai. Pada tahap selanjutnya pada pertengahan bulan September, peneliti kembali ke lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap kelompok tani Palo Lubuak yang merupakan kelompok tani yang juga berada di kawasan perbukitan *Jorong* Sipingai. Selama waktu itu banyak pengalaman sekaligus data dan fakta yang diperoleh peneliti langsung dari hasil partisipasi peneliti selama di lapangan.

Tahap selanjutnya penelitian ini difokuskan pada analisis data dan tinjauan pustaka, sebelumnya analisis data ini telah dimulai, namun masih dalam bentuk general. Pada bulan Oktober 2017 penelitian ini mulai ditulis dalam bentuk laporan tertulis. Selanjutnya peneliti mulai melakukan proses bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing, dengan tujuan agar penelitian ini dapat disempurnakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang telah direncanakan sebelumnya.

Tahap selanjutnya laporan tertulis dalam bentuk draft skripsi ini kemudian diajukan dan dipertahankan dalam sidang skripsi pada tanggal 16 Oktober 2018 di Ruang Ketua Jurusan Antropologi, Universitas Andalas, sebagai tahap akhir untuk melengkapi persyaratan mendapatkan gelar sarjana sosial di Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Bentuk final dari karya tulis berbentuk skripsi ini diberi judul “Pengelolaan *Porak Liek* oleh Petani di *Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota*” seperti yang tertera pada halaman sampul skripsi.

